

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 8, Agustus 2024

Peran Pemerintah Desa dalam Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDES di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Chairullah Amin, Yetty, Muhammad Kotib, Didi Deni
Dosen Universitas Khairun Ternate, Indonesia.

E- Mail: chairulahamin79@gmail.com, yetty@unkhair.ac.id, Muhammad khotib@gmail.com, didideni936@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Untuk Mengetahui Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, Untuk Mengetahui Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah sampel objek penelitian adalah 11 Desa dan peneliti hanya menemukan 5 Desa BUMDes yang aktif di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Alat uji yang di gunakan adalah metode analisis DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk mengetahui Efisiensi dengan menggunakan program Windeap Software. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh melalui Kantor Desa, Tenaga Kerja BUMDes, dan beberapa sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tenaga Kerja di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. 2) Pendapatan Perkapita Desa di 5 Desa efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. 3) Alokasi Anggaran Kegiatan di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Kata Kunci: BUMDES, Pemerintah Desa, Perekonomian Masyarakat

Abstract

The aims of this research are: 1) To determine the effectiveness of BUMDes workforce on the village economy in South Jailolo District, West Halmahera Regency. 2) To find out the effectiveness of per capita income on the village economy in South Jailolo District, West Halmahera Regency. 3) To determine the effectiveness of the role of the Village Fund Budget on the Village Economy in South Jailolo District, West Halmahera Regency. The number of samples of the research object is 11 villages and researchers only found 5 active BUMDes Villages in South Jailolo District, West Halmahera Regency. The test tool used is the DEA analysis method (Data Envelopment Analysis) to determine the efficiency by using the Windeap Software program. Sources of data are secondary data obtained through the Village Office, BUMDes Workforce, and several other sources. The results showed that: 1) Labor in Ratem Village and Gamlenge Village was not effective on the economy of the community in South Jailolo District, West Halmahera Regency. 2) Village income per capita in 5 villages is effective for the economy of the community in South Jailolo District, West Halmahera Regency. 3) Activity budget allocations in Ratem Village and Gamlenge Village are not effective for the economy of the community in South Jailolo District, West Halmahera Regency.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta normatif. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi sosiologis adalah bahwa potensi ekonomi Desa-Desa di Kabupaten Halmahera Barat semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya motivasi normatif adalah pengundangan peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggi dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Norma hukum di tingkat Undang-Undang dan peraturan Pemerintah serta peraturan menteri ini yang harus direspon oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah. Dan Peraturan Desa yang telah berlaku tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang-Undangan dan dinamika masyarakat Pedesaan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat (<http://jdih.halbakab.go.id> 2019).

Kabupaten Halmahera Barat salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Indonesia, IbuKota Kabupaten ini terletak di Jailolo. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.704,00 km² dan berpenduduk sebanyak 136.092 jiwa (2020) jumlah penduduk di Kabupaten ini 10,42 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara yang 1.305.092 jiwa. Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara yang semula merupakan Kabupaten induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Halmahera Barat.

Menurut Lorosa (2017) dalam (Eikman & Vinuzia, 2020) Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibukota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Menurut Lumintang dan Waani (2020) dalam (Khasanah & Riyaur, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang sepenuhnya dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian desa, selanjutnya BUMDes merupakan dasar kegiatan ekonomi di desa. Sehingga dalam pelaksanaannya BUMDes diharapkan dapat menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan. Selain itu BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga komersial dengan tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes adalah motor penggerak perekonomian desa, sehingga potensi yang dimiliki desa jika dikembangkan dengan baik dan benar, akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di desa. Sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa maka pendirian BUMDes didirikan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi. BUMDes didirikan sebagai pola awal dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2002) dalam (Rachman, 2018) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ber- dasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara etimologi, kata berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan mengatur sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yaitu: “otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan di pedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung, masyarakat dari kelompok baik itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga untuk mengurangi pengangguran.

Menurut Michael (2017) dalam (Suryadi & Rusli, 2021) Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa di berikan kewenangan untuk mengelolah sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Program pembangunan yang di lakukan, pemerintah menjadi aktor penting di dalam pembangunan tersebut maka di dalam melaksanakan pembangunan di butuhkan lembaga yang mampu menjadi wada atau menjadi saluran pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan di pedesaan.

Menurut Nurcholis (2011) dalam (Rachman, 2018) BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.

Berdasarkan Data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1022 BUMDes telah berkembang diseluruh indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dari 1022 Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes dan Sumatera Utara dengan 173 BUMDes (kompas.com.2015). Berdasarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku utara menyebutkan jumlah data BUMDes yang ada di Kabupaten Halmahera Barat dari 169 Desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 117 Desa dengan jumlah BUMDes yang aktif 73 BUMDes dan 44 BUMDes yang tidak aktif.

Program Badan Usaha Milik Desa juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan wawasan para kepala desa guna memantapkan langka mereka dalam mengelolah Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya adalah program yang hendak di jalankan ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan pengelolaan yang baik dan benar. Pemerintah daerah benar-benar memfasilitasi terkait dengan pengembangan BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian di desa. Pengembangan manajemen BUMDes, serta dasar hukum yang jelas pendirian BUMdes dengan membuat peraturan daerah. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini meliputi pendampingan dalam penyusunan AD/ART, pembuatan akta notaris, pelatihan kepada direktur atau pengelola BUMDes yang bekerja sama dengan badan pengembangan masyarakat dan pemerintahan di desa tingkat kecamatan.

Dalam pembangunan Ekonomi pedesaan, Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang sangat sentral di dalam mendukung pembangunan Nasional. BUMDes merupakan lembaga yang menjadi salah satu cara untuk melancarkan pemerintah desa mampu mengoptimalkan lembaga tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki lembaga hukum yang menjadi landasan operasional, di dalamnya mengatur tentang laporan pertanggung jawaban dari keberlangsungan BUMDes. Pengelola BUMDes wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa dan kemudian kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan forum Musyawarah Desa. Tujuannya untuk menjamin kinerja BUMDes di dalam mensejahterakan masyarakat desa, dan juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas di dalam BUMDes.

Dalam fenomena-fenomena tersebut, bahwa banyak kasus BUMDes dilakukan pelanggaran pelaksanaan oleh pelaksana kebijakan dan juga adanya penguasaan modal BUMDes. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik meneliti Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan Di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut, di ataur mengenai pembentukan BUMDes harus melalui Musyawarah Desa. Hal tersebut untuk menampung berbagai aspirasi Masyarakat dan berdirinya BUMDes harus di latar belakang adanya potensi Ekonomi yang dikelola oleh BUMDes. Pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menopang pelaksana kebijakan agar mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, sehingga pengelolaannya dilakukan Pemerintah bersama Masyarakat.

Isi kebijakan Badan Usaha Milik Desa tersebut telah mengatur dimulai dari syarat berdirinya sampai dengan pelatihan yang diberikan untuk memperlancar Kinerja BUMDes yang ada, sehingga dalam Penelitian ini Peneliti meneliti dari segi tempat pelaksanaan Efektivitas Kinerja BUMDes di kecamatan Jailolo Selatan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil Kinerja BUMDes.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah di ungkapkan maka permasalahan dalam peneliti ini adalah:

- 1) Bagaimana Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 2) Bagaimana Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Bagaimana Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Efektivitas Tenaga Kerja BUMDes Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 2) Untuk Mengetahui Efektivitas Pendapatan Perkapita Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- 3) Untuk Mengetahui Efektivitas Peranan Anggaran Dana Desa Terhadap Perekonomian Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- 1) Agar memberikan kontribusi dan menambah pengembangan ilmu Pengetahuan dalam bidang Ilmu Ekonomi.
- 2) Pembangunan desa dapat meningkatkan pelayanan publik di desa, dengan perspektif masyarakat lokal harus di sinergikan karena sering terjadi kesejangan antara pandangan pemerintah dengan masyarakat.

- 3) Pembangunan daerah kabupaten untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat mengingat judul yang penulis angka tersebut sangat menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Desa yang suda berhasil dan Badan Usaha Milik Desa yang kurang berhasil, untuk di teliti. Penelitian ini akan di laksanakan pada bulan Desember 2021 sampai selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tentang Efektivitas Kinerja BUMDes Adapun data yang di peroleh dari instansi yang di maksud adalah Kantor Desa dan Tenaga Kerja BUMDes serta hasil pengolahan data di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Data yang di gunakan sebagai berikut :

- 1) Data Alokasi Anggaran Kegiatan
- 2) Data Tenaga Kerja
- 3) Data Pendapatan Perkapita Desa
- 4) Data Kemiskinan (PKH)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang di peroleh dari Kantor Desa dan Tenaga Kerja BUMDes serta hasil pengolahan data di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Adapun data yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

3.4 Metode Analisis Data (DEA)

Dalam penelitian ini mencoba mengukur Efektivitas Kinerja BUMDes dalam perekonomian masyarakat di daerah perdesaan. Adapun indikator input yang digunakan yaitu Alokasi Anggaran Kegiatan (X_1), Tenaga Kerja (X_2), dan pendapatan perkapita desa (X_3). Sedangkan variabel output yang digunakan yaitu Kemiskinan (Y). Gambaran sederhana proses analisis DEA dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel 3.1 Analisis Efektivitas Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan Analisis	Data yang dibutuhkan		Metode Analisis
	Input	Output	
Untuk mengukur Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan	1. Alokasi Anggaran Kegiatan X_1 2. Tenaga Kerja X_2	Kemiskinan Y	Analisis DEA

3. Penda
patan
Perka
pita
Desa
X₃

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1.4 Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada di desa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi di tingkat pedesaan menjadi bagian sangat penting dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyataan.

1.1.5 Hasil Data 3 Input BUMDes di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2021

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang sepenuhnya di kelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian desa, selanjutnya BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pertimbangan dalam pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Namun disini peneliti menemukan di lapangan untuk 5 Desa di Kecamatan jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat mereka hanya menerima Alokasi Anggaran Kegiatan di tahun pertama setelah di bentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini di sebabkan Karna Tenaga Kerja BUMDesnya masih minim dan kemudian kurangnya pengetahuan dalam mengelola kegiatan atau BUMDes tersebut, serta manajemen pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Kemudian BUMDes di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat ada yang masih aktif dan ada yang sudah macet. Faktor utama macet usaha BUMDes adalah ketika Tenaga Kerja BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa sehingga unit usaha yang di gunakan atau di jalankan tidak berjalan dengan baik, maka dari itu Pemerintah Desa tidak lagi memberikan/mengalokasikan Anggaran BUMDes pada tahun berikutnya dan kemudian Pendapatan Perkapita Desa di 5 Desa sudah efektif dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Berikut tabel hasil 3 Input data BUMDes di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat :

Penulis menemukan bahwa terdapat 5 desa BUMDes yang aktif dari 11 Desa yang menjadi obyek penelitian di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2021, di mana masing-masing desa tersebut terdapat kegiatan dan usahanya masing-masing. Namun yang ditemukan di lapangan mereka hanya bisa menerima Alokasi anggaran kegiatan di tahun pertama setelah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini disebabkan karna Tenaga Kerja BUMDesnya masih minim, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kegiatan di kelompok tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam usaha harusnya memiliki beberapa keahlian dalam pengelolaannya yaitu ;

- a. Motif berprestasi
- b. Selalu perspektif
- c. Berdaya cipta tinggi
- d. Memiliki prilaku yang baik
- e. Inovatif tinggi
- f. Memiliki komitmen dalam pekerjaan
- g. Memiliki etos kerja dan tanggung jawab
- h. Mandiri atau tidak bergantung pada orang lain
- i. Berani menghadapi resiko
- j. Selalu mencari peluang
- k. Memiliki jiwa kepemimpinan
- l. Memiliki kemampuan personal

1.1.6 Hasil Data Output Kemiskinan (PKH) di 11 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2021

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Kondisi kemiskinan menyebabkan anak putus sekolah atau tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali, bahkan ada yang harus membantu mencari nafkah. Akhirnya kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan terjeret pada lingkaran kemiskinan.

Jumlah Kemiskinan atau (PKH) adalah Program Keluarga Harapan yang di mana program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) pada 11 desa yang berada di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, ada mengalami peningkatan dan penurunan jumlah kemiskinan PKH terbesar di alami di Desa Sidangoli Dehe, Desa Domato, Desa Tataleka, Desa Tuguraci, Desa Moiso, Desa Biamahi, dan Desa Sidangoli Gam. Sedangkan jumlah kemiskinan (PKH) terendah terjadi pada Desa Ratem, Desa Ake jailolo, Desa Bubanedano, dan Desa Gamlenge.

Kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi data dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap kabupaten sampai ke Desa memiliki sendiri defenisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perkonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap defenisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan kumsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penentuan Variabel *Input* dan *Output* BUMDes di 5 Desa di kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat

Efisiensi di defenisikan sebagai perbandingan antara *output dan input* langka pertama dalam menggunakan DEA adalah menentukan variabel input dan variabel output. Pengukuran efisiensi BUMDes di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Variabel *input* merupakan Modal Dasar BUMDes yang bersifat Alokasi Anggaran Kegiatan, Tenaga Kerja, dan Pendapata Perkapita Desa yang semuanya di gunakan untuk meningkatkan Perekonomian Desa. Variabel input dalam Pengukuran Efisiensi di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat adalah Alokasi Anggaran Kegiatan,

Tenaga Kerja, dan Pendapatan Perkapita Desa. Sedangkan variabel output adalah faktor yang menggambarkan tingkat Kemiskinan (PKH) Program Keluarga Harapan di 5 desa di kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Gambaran umum sampel data yang di gunakan berdasarkan hasil analisis program DEAP seperti tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Data Output Kemiskinan (Y) dan Input Alokasi Anggaran Kegiatan X^1 , Tenaga Kerja X^2 , Dan Pendapatan Per kapita Desa x^3 . di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Y	5	27.8	13.57203	12	47
X1	5	86	55.49775	30	150
X2	5	6.2	4.604346	3	13
X3	5	420	109.5445	300	500

Sumber: Hasil Uji Data DEA di Olah Tahun 2023

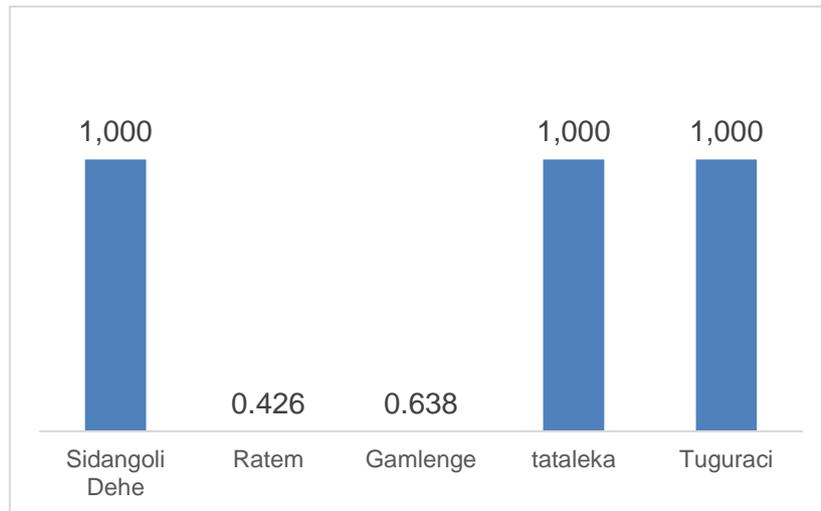
4.2.2 Penentuan *Decision Making Units* (DMU)

DMU di artikan sebagai unit yang akan di analisa dalam pengukuran efisiensi. Jumlah DMU yang di gunakan adalah Jumlah Desa yang di mana objek penelitiannya dari 11 Desa dan di temukan terdapat 5 Desa yang aktif BUMDesnya di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017-2021 di mana masing-masing desa tersebut terdapat kegiatan dan usahanya masing-masing. Namun yang ditemukan dilapangan mereka hanya bisa menerima Alokasi anggaran kegiatan di tahun pertama setelah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini disebabkan karna Tenaga Kerja BUMDesnya masih minim, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kegiatan di kelompok tersebut.

4.2.3 Perhitungan Skor Efisiensi Relatif dengan Aplikasi DEAP

Pendekatan DEA di gunakan untuk mendapatkan skor efisiensi Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yaitu menggunakan program DEAP pada Gambar 4.2 terdapat 1 model yang di hasilkan dari program DEAP sebagai perbandingan, yaitu model CRS. Penelitian ini menggunakan asumsi skala CRS di karenakan model ini secara umum menghasilkan skor efisien dan tidak efisien. Selain itu model CRS mengansumsikan bahwa DMU tidak atau belum beroperasi secara optimal. Penelitian ini berorientasikan kepada variabel input, yang berarti bahwa ketika sebuah DMU yang tidak efisien ingin mencapai level yang efisien maka ia perlu mengurangi proporsi variabel input sementara itu proporsi output tetap konstan.

Sebuah DMU yang memiliki kinerja tidak efisien selalu menghasilkan *slacks*, yakni perbandingan ataupun peningkatan (penambahan variabel output atau pengurangan variabel input) yang di perlukan oleh DMU untuk mencapai level kinerja yang efisien. Slacks hanya ada pada DMU yang tidak efisien dan efisien pada model CRS. Apabila sala satu model menghasilkan skor 1 (efisien) maka nilai slack adalah nol. Pada dasarnya *slack* dapat dilihat inefisiensi alokatif pada DMU. Perhitungan slack menggunakan metode *multi-stage*. Multi stage DEA yaitu mengurutkan program linier yang radial untuk mengenditifikasikan titik proyeksi yang efisien, di mana di miliki campuran variabel input dan output yang semirip mungkin dengan titik proyeksi yang tidak efisien Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Untuk model CRS dapat di lihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Distribusi Kumulatif Skor Efisiensi Model CRS

Sumber : Hasil Uji DEA Data di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 4.2 BUMDes di 5 Desa yang memiliki kinerja efisien hanya berjumlah 3 Desa yaitu Desa Sidangoli Dehe, Desa Tataleka, dan Desa Tuguraci dengan CRS 1.000 maka nilai Efisiensi di katakan 100% di karenakan total nilai Alokasi Anggaran Kegiatan, Tenaga Kerja, Pendapatan Perkapita Desa, dan Kemiskinan yang suda efisien terlihat dari Original Value dan Projected Value yang sama nilainya pada Uji Data DEA.

Kemudian rata-rata skor Inefisiensi Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat yang terendah/tidak efisien CRS terdapat di 2 Desa yaitu Desa Ratem CRSnya 0.426 atau sebesar 42,6% dan Desa Gamlenge CRSnya 0.638 atau sebesar 63,8% di karenakan total nilai Alokasi Anggaran Kegiatan, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan pada Original Value dan Projected Value berbeda pada Uji Data DEA sehingga 2 Desa tersebut tidak di katakan efisien.

Maka di simpulkan bahwa terjadinya efisien dan tidak efisien dalam model CRS, Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan Kecamatan Jailolo selatan Kabupaten Halmahera Barat di 5 Desa adalah Sebuah DMU yang memiliki kinerja tidak efisien selalu menghasilkan *slacks*, yakni perbandingan ataupun penigkatan (penambahan variabel output atau pengurangan variabel input) yang di perlukan oleh DMU untuk mencapai level kinerja yang efisien. Slacks hanya ada pada DMU yang tidak efisien dan efisien pada model CRS. Apabila sala satu model menghasilkan skor 1 (efisen) maka nilai slack adalah nol. Pada dasarnya *slack* dapat dilihat inefisiensi alokatif pada DMU. Perhitungan slack menggunakan metode *multi-stage*. Multi stage DEA yaitu mengurutkan program linier yang radial untuk mengenditinfikasikan titik proyeksi yang efisien, di mana di miliki campuran variabel input dan output yang semirip mungkin dengan titik proyeksi yang tidak efisien Efektivitas Kinerja BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat di Daerah Perdesaan di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

4.2.4 Infisiensi BUMDes di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan menunjukan Variabel Input/Output, Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value

Berikut dapat dilihat tingkat Infisiensi pada masing-masing BUMDes, berdasarakan masing-masing variabel input dan output di 5 Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut:

4.2.5 Efisiensi Desa Sidangoli Dehe Periode Tahun 2019

Desa Sidangoli Dehe memiliki BUMDes yang di namakan “Cipta karya” yang dimana di pertanggungjawabkan oleh 3 Tenaga Kerja BUMDes dengan Unit Usaha Simpan Pinjam kemudian untuk Pendapatan Perkapita Desa yaitu sebesar Rp 500.000. Sedangkan Alokasi Anggaran Kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2019 sebesar 90 Juta sebagai rangsangan awal sehingga unit usaha yang di jalankan pada tahun 2019-2021 masih berjalan dengan baik. Kemudian untuk jumlah tingkat Kemiskinan (PKH) sebesar 47 orang. Mayoritas penduduk Desa Sidangoli Dehe beragama Islam, kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Sidangoli Dehe tidak terlalu nampak di desa secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya, rata-rata mengandalkan hidupnya dari Pedagang dan Nelayan. Maka dalam Pengukuran efisiensi pada Desa Sidangoli Dehe menunjukkan efisien pada uji data DEA ini disebabkan karena dalam pengelolaan para tenaga kerja BUMDes mampu mengelola unit usaha tersebut. Sedangkan Pendapatan Perkapita Desa dan Alokasi Anggaran Kegiatan mereka cukup besar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sidangoli Dehe. Berikut tabel hasil uji data DEA di Desa Sidangoli Dehe Periode Tahun 2019 :

Tabel 4.5 Nilai Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value di Desa Sidangoli Dehe Periode Tahun 2019

VARIABLE	ORIGINAL VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT	PROJECTED VALUE	TEHNICAL EFFICIENCY
OUTPUT 1 (KEMISKINAN)	47	0.000	0.000	47	1.000
INPUT 1 (AAK)	90.000.000	0.000	0.000	90.000.000	
INPUT 2 (TK)	3	0.000	0.000	3	
INPUT 3 (PPD)	500.000	0.000	0.000	500.000	

Sumber: Hasil Uji Data DEA Di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 Selama periode tahun 2019 untuk Desa Sidangoli Dehe mempunyai nilai efisiensi pada input 1 Alokasi Anggaran Kegiatan, Input 2 Tenaga Kerja, Input 3 Pendapatan perkapita Desa, dan Output 1 yaitu Kemiskinan Memiliki nilai yang sama yang menunjukkan efisiensi di Desa Sidangoli Dehe selama 1 tahun di buktikan dengan hasil yang di peroleh pada kolom Projected Value dan Original Value.

Desa Sidangoli Dehe di katakan efisien karena nilai pada Original Value dan Projected Value mendapatkan hasil yang sama, yang kemudian memberikan nilai pada Tehnical Efficiency 1.000 sehingga memberikan bukti bahwa hasil olahan data pada Desa Sidangoli Dehe di katakan efisien.

4.2.6 Inefisiensi Desa Ratem Periode Tahun 2019

Desa Ratem memiliki BUMDes yang di namakan “Fomarimoi” yang di mana di pertanggungjawabkan oleh 9 Tenaga Kerja BUMDes dengan Unit Usaha Rumah Makan kemudian untuk Pendapatan Perkapita Desa mereka yaitu sebesar Rp 300.000. Sedangkan Alokasi Anggaran Kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2019 sebesar 150 juta sebagai rangsangan awal dalam pengelolaan BUMDes, meskipun modal Alokasi Anggarannya besar dan BUMDes yang di jalankan pada tahun 2019-2021 akan tetapi para Tenaga Kerja BUMDes belum mampu mempertanggung jawabkan dalam pengelolaan keuangan kelompok BUMDes tersebut. Faktor utama macetnya BUMDes adalah ketika Tenaga Kerja BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa

yang di miliki sehingga unit usaha yang di gunakan untuk rumah makan tidak berjalan dengan baik, maka dari itu Pemerintah Desa tidak lagi memberikan Anggaran pada tahun berikutnya. Kemudian untuk jumlah tingkat Kemiskinan (PKH) sebesar 12 orang. Mayoritas penduduk desa Ratem beragama Islam. Kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Ratem tidak terlalu nampak di desa. Secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya, rata-rata mengandalkan hidupnya dari Perkebunan dan Pertanian. Maka dalam Pengukuran efisiensi pada Desa Ratem menunjukkan inefisiensi/tidak efisien pada uji data DEA ini di sebabkan karena dalam pengelolaan BUMDes para Tenaga Kerja belum mampu mengelolah BUMDes dengan baik, sedangkan Pendapatan Perkapita Desa di Desa Ratem nilai efisiensi sudah optimal artinya masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 300.000 berpotensi tergolong kelompok miskin. Dan meskipun Alokasi Anggaran begitu besar akan tetapi BUMDes yang di jalankan tidak sesuai keinginan/harapan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat di Desa Ratem masi rendah.

Berikut tabel hasil uji data DEA di Desa Ratem Periode Tahun 2019 :

Tabel 4.6 Nilai Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value di Desa Ratem Periode Tahun 2019

VARIABLE	ORIGINAL VALUE	RADIAL MOVEMEN T	SLACK MOVEMENT	PROJECTED VALUE	TEHNICAL EFFICIENC Y
OUTPUT 1 (KEMISKINAN)	12	16.2	0.000	28.2	0.426
INPUT 1 (AAK)	150.000.000	0.000	96.000.000	54.000.000	
INPUT 2 (TK)	9	0.000	7.2	1.8	
INPUT 3 (PPD)	300.000	0.000	0.000	300.000	

Sumber: Hasil Uji Data DEA Di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 Hasil Olah Data menunjukkan hasil bahwa Desa Ratem mengalami Inefisiensi/Tidak Efisien pada input 1 Alokasi Anggaran Kegiatan, Input 2 Tenaga Kerja, dan Output 1 Kemiskinan. Ketidakefisiensi pada Desa Ratem disebabkan karena kelebihan dalam menggunakan input yang dimiliki sebesar 0.426 atau sebesar 42,6%. Hal ini terlihat dari penggunaan input 1 dimana Alokasi Anggaran Kegiatan mengalami ketidakefisiensi sebanyak Rp 96.000.000 dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp 54.000.000 Demikian pula pada input 2 yaitu Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang efektif diperlukan yaitu sebanyak 1.8 Sedangkan untuk input 3 yaitu Pendapatan Perkapita Desa, nilai efisiensi sudah optimal yaitu sebesar Rp 300.000 Artinya masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 300.000 berpotensi tergolong kelompok miskin.

4.2.7 Inefisiensi Desa Gamlenge Periode Tahun 2018

Desa Gamlenge memiliki BUMDes yang di namakan “Usaha Bersama” yang di mana di pertanggungjawabkan oleh 3 Tenaga Kerja BUMDes dengan unit usaha Pembuatan Sagu Kasbi kemudian untuk Pendapatan Perkapita Desa yaitu sebesar Rp 300.000. Sedangkan Alokasi Anggaran Kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2018 sebesar 130 juta sebagai rangsangan awal dalam pengelolaan BUMDes, meskipun modal Alokasi Anggarannya begitu besar dan BUMDes yang dijalankan pada tahun 2018 akan tetapi para Tenaga Kerjanya belum mampu mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan

kelompok BUMDes tersebut. Faktor utama macetnya BUMDes adalah ketika Tenaga Kerja BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa yang di miliki sehingga unit usaha yang digunakan untuk pembuatan sagu kasbi tidak berjalan dengan baik, maka dari itu Pemerintah Desa tidak lagi memberikan Anggaran pada tahun berikutnya. Kemudian untuk jumlah tingkat Kemiskinan (PKH) sebesar 18 orang. Mayoritas penduduk Desa Gamlenge beragama Kristen. Kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Gamlenge tidak terlalu nampak di desa. Secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya, rata-rata mengandalkan hidupnya dari petani. Maka dalam Pengukuran efisiensi pada Desa Gamlenge menunjukkan inefisiensi/tidak efisien pada uji data DEA ini disebabkan karena dalam pengelolaan BUMDes para Tenaga Kerja belum mampu mengelola BUMDes dengan baik. Sedangkan Pendapatan Perkapita Desa di Desa Gamlenge nilai efisiensi sudah optimal artinya masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 300.000 berpotensi tergolong kelompok miskin. Dan meskipun Alokasi Anggaran begitu besar akan tetapi BUMDes yang dijalankan tidak sesuai keinginan/harapan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat di Desa Gamlenge masih rendah.

Berikut tabel hasil uji data DEA di Desa Gamlenge Periode Tahun 2018 :

Tabel 4.7 Nilai Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value di Desa Gamlenge Periode Tahun 2018

VARIABLE	ORIGINAL VALUE	RADIAL MOVEMEN T	SLACK MOVEMEN T	PROJECTED VALUE	TEHNICAL EFFICIENC Y
OUTPUT 1 (KEMISKINA N)	18	10.2	0.000	28.2	0.638
INPUT 1 (AAK)	130.000.0 00	0.000	76.000.00 0	54.000.000	
INPUT 2 (TK)	3	0.000	1.2	1.8	
INPUT 3 (PPD)	300.000	0.000	0.000	300.000	

Sumber: Hasil Uji Data DEA Di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 Hasil Olah Data menunjukkan hasil bahwa Desa Gamlenge mengalami Inefisiensi/Tidak Efisien pada input 1 Alokasi Anggaran Kegiatan, Input 2 Tenaga Kerja, dan Output 1 Kemiskinan. Ketidakefisiensi pada Desa Gamlenge disebabkan karena kelebihan dalam menggunakan input yang dimiliki sebesar 0.638 atau sebesar 63,8%. Hal ini terlihat dari penggunaan input 1 dimana Alokasi Anggaran Kegiatan mengalami ketidakefisiensi sebanyak Rp 76.000.000 dari yang seharusnya yaitu sebesar Rp 54.000.000 Demikian pula pada input 2 yaitu Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja yang efektif diperlukan yaitu sebanyak 1.8 Sedangkan untuk input 3 yaitu Pendapatan Perkapita Desa, nilai efisiensi sudah optimal yaitu sebesar Rp 300.000 Artinya masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 300.000 berpotensi tergolong kelompok miskin.

4.2.8 Efisiensi Desa Tataleka Periode Tahun 2020

Desa Tataleka memiliki BUMDes yang di namakan “Masigaro” yang dimana di pertanggungjawabkan oleh 13 Tenaga Kerja BUMDes dengan Unit Usaha Penyewahan 100 Buah Kursi kemudian untuk Pendapatan Perkapita Desa yaitu sebesar Rp 500.000. Sedangkan

Alokasi Anggaran Kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020 sebesar 30 Juta sebagai rangsangan awal sehingga unit usaha yang di jalankan pada tahun 2020-2021 masih berjalan dengan baik. Kemudian untuk jumlah tingkat Kemiskinan (PKH) sebesar 32 orang. Mayoritas penduduk Desa Tataleka beragama Islam, kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Tataleka tidak terlalu nampak di desa secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya, rata-rata mengandalkan hidupnya dari petani. Maka dalam Pengukuran efisiensi pada Desa Tataleka menunjukan efisien pada uji data DEA ini disebabkan karena dalam pengelolaan para tenaga kerja BUMDes mampu mengelolah unit usaha tersebut. Sedangkan Pendapatan Perkapita Desa dan Alokasi Anggaran Kegiatan mereka cukup besar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tataleka.

Berikut tabel hasil uji data DEA di Desa Tataleka Periode Tahun 2020 :

Tabel 4.8 Nilai Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value di Desa Tataleka Periode Tahun 2020

VARIABLE	ORIGINAL VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT	PROJECTED VALUE	TEHNICAL EFFICIENCY
OUTPUT 1 (KEMISKINAN)	32	0.000	0.000	32	1.000
INPUT 1 (AAK)	30.000.000	0.000	0.000	30.000.000	
INPUT 2 (TK)	13	0.000	0.000	13	
INPUT 3 (PPD)	500.000	0.000	0.000	500.000	

Sumber: Hasil Uji Data DEA Di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 Selama periode tahun 2020 untuk Desa Tataleka mempunyai nilai efisiensi pada input 1 Alokasi Anggaran Kegiatan, Input 2 Tenaga Kerja, Input 3 Pendapatan perkapita Desa, dan Output 1 yaitu Kemiskinan. Memiliki nilai yang sama yang menunjukan efisiensi di Desa Tataleka selama 1 tahun di buktikan dengan hasil yang di peroleh pada kolom Projected Value dan Original Value.

Desa Tataleka di katakan efisien karena nilai pada Original Value dan Projected Value mendapatkan hasil yang sama, yang kemudian memberikan nilai pada Tehnical Efficiency 1.000 sehingga memberikan bukti bahwa hasil olahan data pada desa Tataleka di katakan efisien.

4.2.9 Efisiensi Desa Tuguraci Periode Tahun 2020

Desa Tuguraci memiliki BUMDes yang di namakan “Usaha Bersama” yang dimana di pertanggungjawabkan oleh 3 Tenaga Kerja BUMDes dengan Unit Usaha Kelompok Pertanian kemudian untuk Pendapatan Perkapita Desa yaitu sebesar Rp 500.000. Sedangkan Alokasi Anggaran Kegiatan yang di berikan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2020 sebesar 30 Juta sebagai rangsangan awal sehingga unit usaha yang di jalankan hanya berjalan 1 tahun saja yaitu pada tahun 2020 masih berjalan dengan baik. Kemudian untuk jumlah tingkat Kemiskinan (PKH) sebesar 30 orang. Mayoritas penduduk Desa Tuguraci sebagian beragama Kristen dan beragama Islam, kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Tuguraci tidak terlalu nampak di desa secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya, rata-rata mengandalkan hidupnya dari petani. Maka dalam Pengukuran efisiensi pada Desa Tuguraci menunjukan efisien pada uji data DEA ini di sebabkan karena dalam pengelolaan para tenaga kerja BUMDes mampu

mengelola unit usaha tersebut. Sedangkan Pendapatan Perkapita Desa dan Alokasi Anggaran Kegiatan mereka cukup besar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tuguraci.

Berikut tabel hasil uji data DEA di Desa Tuguraci Periode Tahun 2020 :

Tabel 4.9 Nilai Original Value, Radial Movement, Slack Movement, dan Projected Value di Desa Tuguraci Periode Tahun 2020

VARIABLE	ORIGINAL VALUE	RADIAL MOVEMENT	SLACK MOVEMENT	PROJECTED VALUE	TEHNICAL EFFICIENCY
OUTPUT 1 (KEMISKINAN)	30	0.000	0.000	30	1.000
INPUT 1 (AAK)	30.000.000	0.000	0.000	30.000.000	
INPUT 2 (TK)	3	0.000	0.000	3	
INPUT 3 (PPD)	500.000	0.000	0.000	500.000	

Sumber: Hasil Uji Data DEA Di Olah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 Selama periode tahun 2020 untuk Desa Tuguraci mempunyai nilai efisiensi pada input 1 Alokasi Anggaran Kegiatan, Input 2 Tenaga Kerja, Input 3 Pendapatan perkapita Desa, dan Output 1 yaitu Kemiskinan. Memiliki nilai yang sama yang menunjukkan efisiensi di Desa Tuguraci selama 1 tahun di buktikan dengan hasil yang di peroleh pada kolom Projected Value dan Original Value.

Desa Tuguraci di katakan efisien karena nilai pada Original Value dan Projected Value mendapatkan hasil yang sama, yang kemudian memberikan nilai pada Tehnical Efficiency 1.000 sehingga memberikan bukti bahwa hasil olahan data pada desa Tuguraci dikatakan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan maka dapat disimpulkan bahwa : Tenaga Kerja di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Ini disebabkan karna tenaga kerja masih minim, dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan BUMDesnya di kelompok tersebut. Pendapatan Perkapita Desa di 5 Desa efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini disebabkan karena para tenaga kerja BUMDes mampu mengelola unit-unit usaha yang mereka jalankan. Alokasi Anggaran kegiatan mereka cukup besar sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Alokasi Anggaran Kegiatan di Desa Ratem dan Desa Gamlenge tidak efektif terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Kenyataannya para Tenaga Kerjanya belum mampu mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan kelompok BUMDes tersebut. Faktor utama macetnya BUMDes adalah ketika Tenaga Kerja BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa yang dimiliki sehingga unit usaha tidak berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Charnes, & W.W. Cooper, E. R. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2, 429–444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
- A. Mahendra. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi*, 3(1), 113–138.
- Adnan. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al'Adl*, VIII(2), 1–19.
- Agusliansyah. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1785–1796.
- Ahn, T., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1988). Efficiency characterizations in different DEA models. *Socio-Economic Planning Sciences*, 22(6), 253–257. [https://doi.org/10.1016/0038-0121\(88\)90007-9](https://doi.org/10.1016/0038-0121(88)90007-9)
- Aksin. (2018). Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Meta Yuridis*, 1(2), 72–74.
- Arida & Zakiyah. (2015). Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Agrisep Unsyiah*, 16(1), 66–78. <https://doi.org/10.24815/agrisep.v16i1.3033>
- Boedirochminarni & Rakhmawati. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(1), 74–82.
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Li, S. (1989). Using data envelopment analysis to evaluate efficiency in the economic performance of chinese cities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 23(6), 325–344. [https://doi.org/10.1016/0038-0121\(89\)90001-3](https://doi.org/10.1016/0038-0121(89)90001-3)
- Coelli, T., Rao, D. S. P., & Battese, G. E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. In *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5493-6>
- Cullinane, K., Wang, T. F., Song, D. W., & Ji, P. (2006). The technical efficiency of container ports: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 40(4), 354–374. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.07.003>
- Eikman & Vinuzia. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 343–352. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1228>
- Faedlulloh. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Farrel, M. . (1957). The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society*, 120(3), 1–34.
- Fiqria & Erfina. (2021). Efektivitas Kinerja Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 9(2), 87–92.
- Hanum & Sarlia. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *SAMUDRA EKONOMIKA*, 3(1), 84–92.
- Juliansyah & Nurbayan. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pdrb, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII(2), 45–51. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v7i2.682>
- Kadek, N., Candra, D., Sinarwati, N. K., & Arie, M. (2017). Efektivitas pengelolaan dana pada badan usaha milik desa kerta danu mandara di desa songan a 1. *E-Jurnal Akutansi*

- Program S1, 8(2), 3–10.
- Khasanah & Riyaur. (2021). Peran BUMDes Dalam Perekonomian Masyarakat Di Daerah Pedesaan (Studi Kasus 3 Desa Yang Ada Di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara) (Vol. 02, Issue 03). <http://trianglesains.makarioz.org>
- Lestari & Masinabow. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 306–314.
- Masniadi. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 69–80. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3718>
- Nizar & Hamzah. (2013). Investasi Dan Tenaga Kerja Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap ... *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Nurhasan & Munawar. (2020). Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu. *Ekonomi Sya'uh Kontemporer*, 1(2), 88–99.
- Nurjani & Sudarmanto. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pada Bumdes Yang Terdapat Di *Jurnal Online Mahasiswa* <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/viewFile/1668/1386>
- Pradesa & Agustina. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2), 159–168. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i2.4768>
- Rachman, T. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Safitri & Jumiati. (2020). Efektivitas Badan Usaha Miik Negara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Negara Di Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 90–97.
- Sari & Syechalad. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 3(2), 109–115.
- Sasauw & gosal. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, 1(1), 1–10.
- Satar & Fariqi. (n.d.). Efektivitas Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. 15–21.
- Sopannah & Kartikasari. (2017). Strategi Pengembangan Bumdes Dalammeningkatkan Efektifitas Pengelolaan Bumdes Di Desa Sumberporong. *Conference on Economics and Business Innovation*, 35, 1–9.
- Suryadi & Rusli. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 29–46. <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34563>
- Sutrisna & Arrozi. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 7(12), 2732–2763.
- Syaputra. (2018). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Likuiditas, Struktur Hutang, Pajak, Real Estate dan Luas Wilayah Terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010-2013. 0771, 1–29.
- Taqiuddin & Zuhilmi. (2020). Efektivitas Penyaluran Modal Usaha dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BUMDes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. *Econotica*, 2(2), 40–65. <https://unu-ntb.e-journal.id/econotica/article/view/107/54>
- Zenda & Suparno. (2017). Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 371–384.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.